

## SINOPSIS

Penelitian ini mengambil judul “Evaluasi kebijakan penghentian sementara pengangkatan CPNS di Pemkab Kulon Progo 2011-2012. Latar belakang dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan lebih pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan kebijakan Moratorium CPNS dikarenakan anggaran APBD mencapai lebih dari 50% untuk kebutuhan kepegawaian. Untuk itu, diperlukan sebuah evaluasi terkait kinerja Badan Kepegawaian Daerah tersebut dalam melihat efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas serta ketepatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana evaluasi kebijakan penghentian sementara pengangkatan (moratorium) CPNS di Pemkab Kulon Progo 2011-2012?”

Penelitian ini dilakukan di Pemkab Kulon Progo, dengan objek penelitian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan atau gambar. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah, ditelaah serta dianalisis agar mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis.

Dari hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan moratorium di BKD Kulon Progo terdapat hasil. bahwa pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam evaluasi kebijakan Moratorium CPNS tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja kepegawaian di SKPD-SKPD yang ada. Dalam upaya pembangunan kualitas terhadap kinerja aparatur daerah tersebut diikuti sertakan ada mengirim SKPD untuk mengikuti Diklat-diklat guna membentuk sumber daya aparatur yang profesional. Kebijakan moratorium dari pemerintah pusat dalam penghentian pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di karenakan anggaran belanja pegawai yang lebih dari 50% di Pemkab Kulon Progo ternyata tidak terlalu berpengaruh. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian hasil kinerja yang terlaksana semua program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo.

Saran bagi pemerintah dalam upaya membangun kualitas aparatur daerah dan kinerjanya dapat dengan menyaring Sumber Daya CPNS yang berkualitas dan mapan guna mencapai efektifitas pelayanan yang maksimal. Perlu adanya kotak saran dalam mengumpulkan aspirasi atau pengawasan masyarakat yang berupa tulisan dalam mengoreksi atau mengevaluasi setiap kebijakan yang ada serta menyediakan informasi yang komplit dalam setiap tugas dan kegiatan dan